

BIMBINGAN TEHNIS KONVENSIS HAK ANAK DAN IMPLEMENTASI KOTA LAYAK ANAK

PEMERINTAH KOTA MADIUN
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2021



MEWUJUDKAN GENERASI EMAS INDONESIA

MODUL : KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK



MOMENTUM
INDONESIA EMAS

& BONUS DEMOGRAFI


2045



Jumlah Generasi Muda Sebanyak **170 JUTA** dari **250 JUTA**

TOPIK MATERI TAYANGAN

- 1** Evaluasi KABUPATEN / KOTA LAYAK ANAK
- 2** Envisioning PROVINSI LAYAK ANAK
- 3** Forward ACTION PLANNING



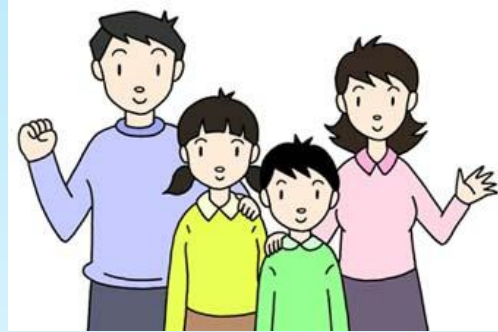
Evaluasi
KABUPATEN / KOTA
LAYAK ANAK
2019

KOMPOSISI PENDUDUK INDONESIA TAHUN 2017



**Penduduk
INDONESIA**

262 juta



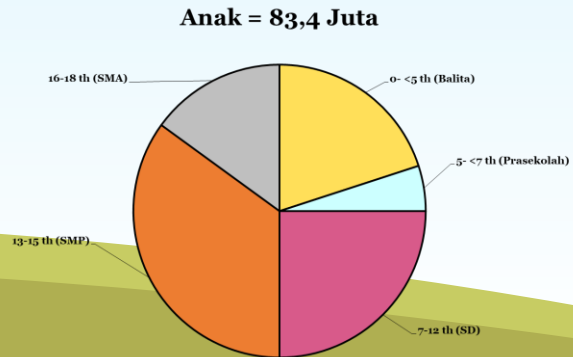
65 juta

**Jumlah
KELUARGA**



**Jumlah
ANAK**

83,4 juta



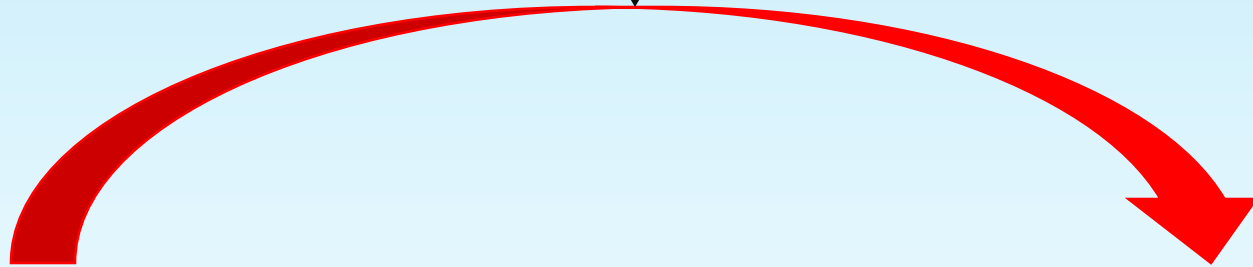
Sumber : Profil Anak Indonesia, KPPPA, 2017

Intervensi ?



Strategi ?

Masalah?



0 - <18 th

28 - <46 th

83,4 juta

≤ 83,4

**Th
2018**

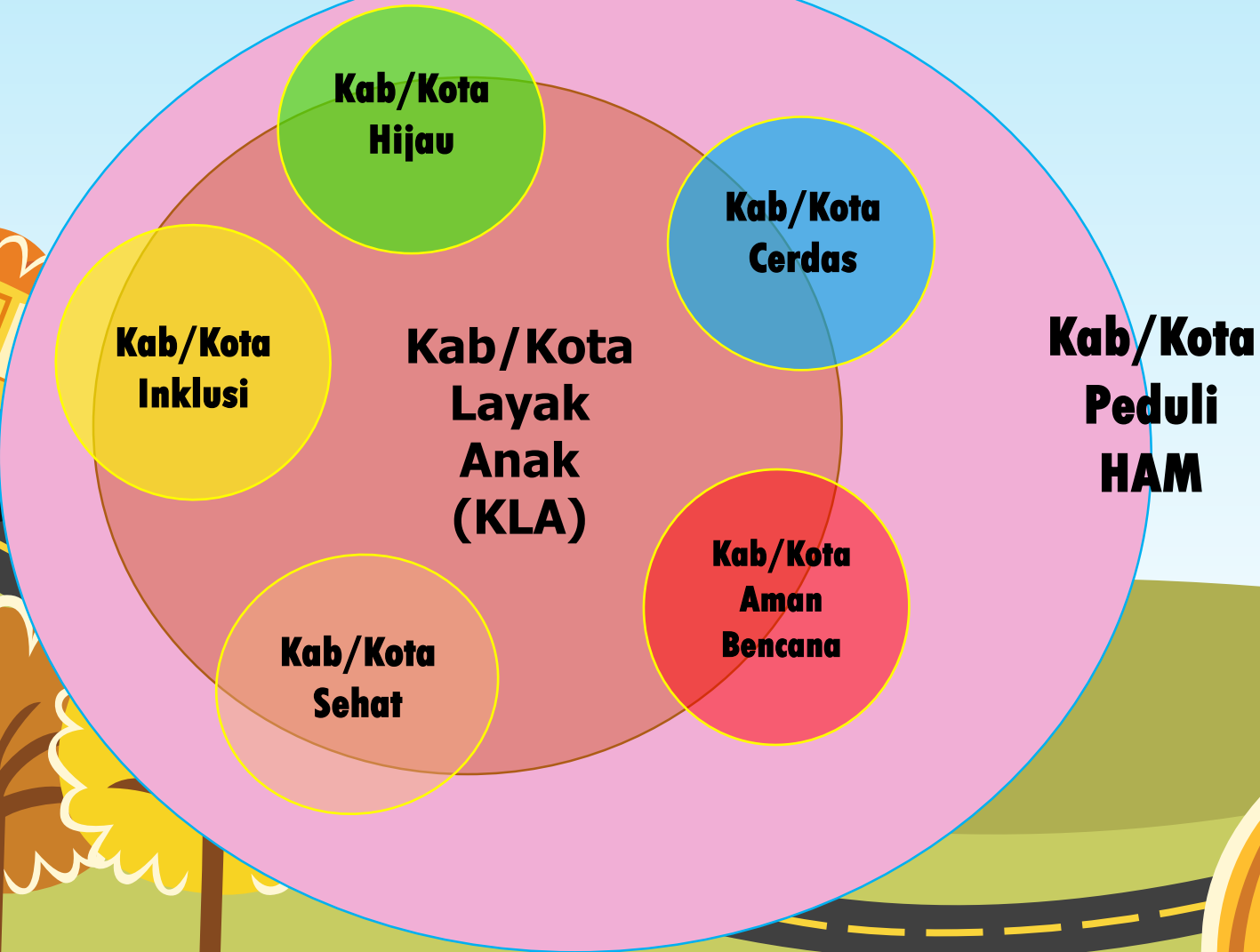
- 1. Obligation to conduct**
- 2. Obligation to achieve**

**Th
2045**

Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)?

kabupaten/kota dengan sistem pembangunan **yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak** yang dilakukan secara **terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.**

KLA Terintegrasi dengan “inisiatif pengembangan Sistem 2 Kabupaten/Kota di Indonesia”



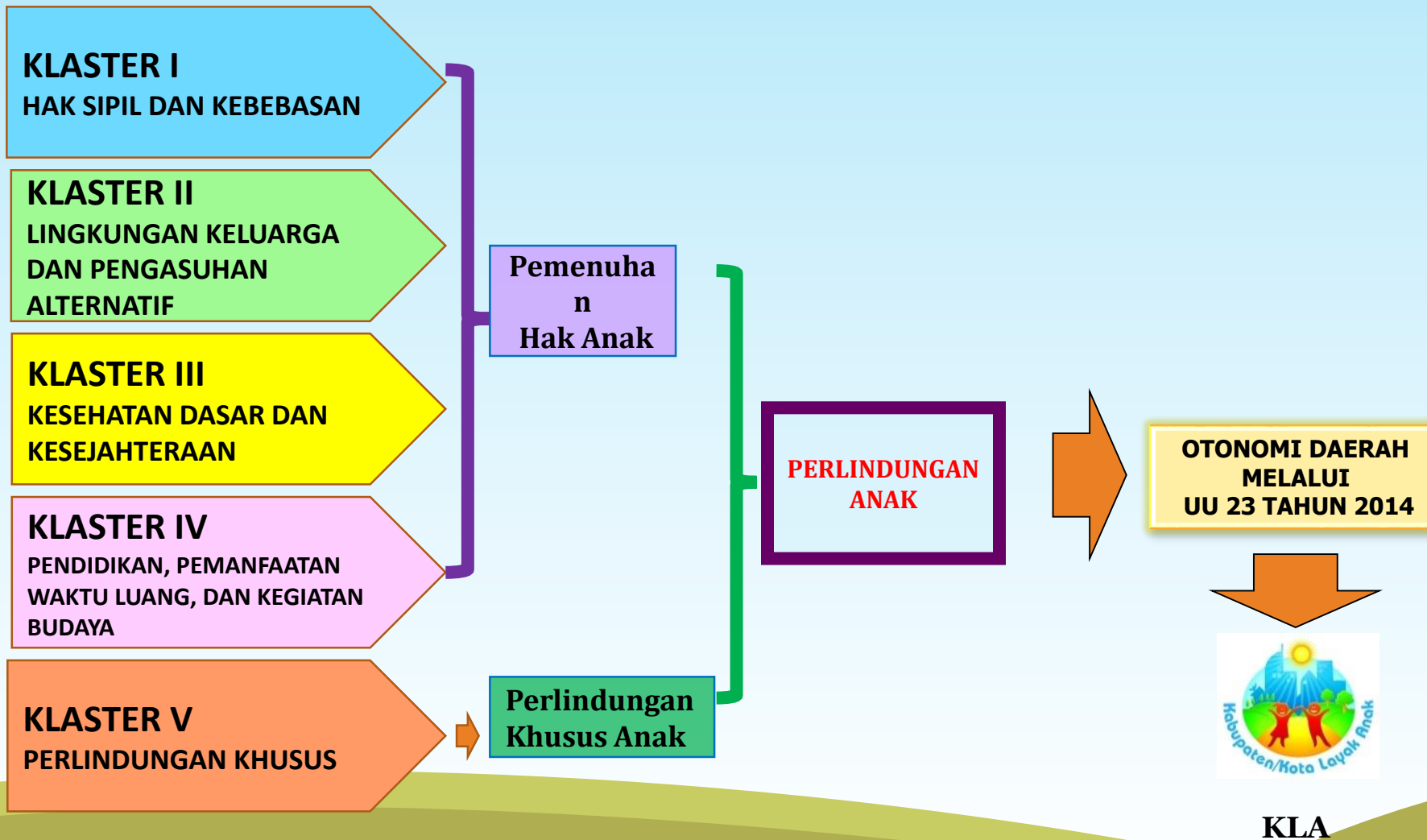


Prinsip KLA

1. Tata kelola “good governance”
2. Kepentingan terbaik
3. Non diskriminasi
4. Hidup , keansungan hidup, tumbuh dan berkembang
5. Menghargai / respect Pandangan anak.



5 KLASTER KONVENSI HAK ANAK di Era Otda Diwujudkan dalam "KLA"



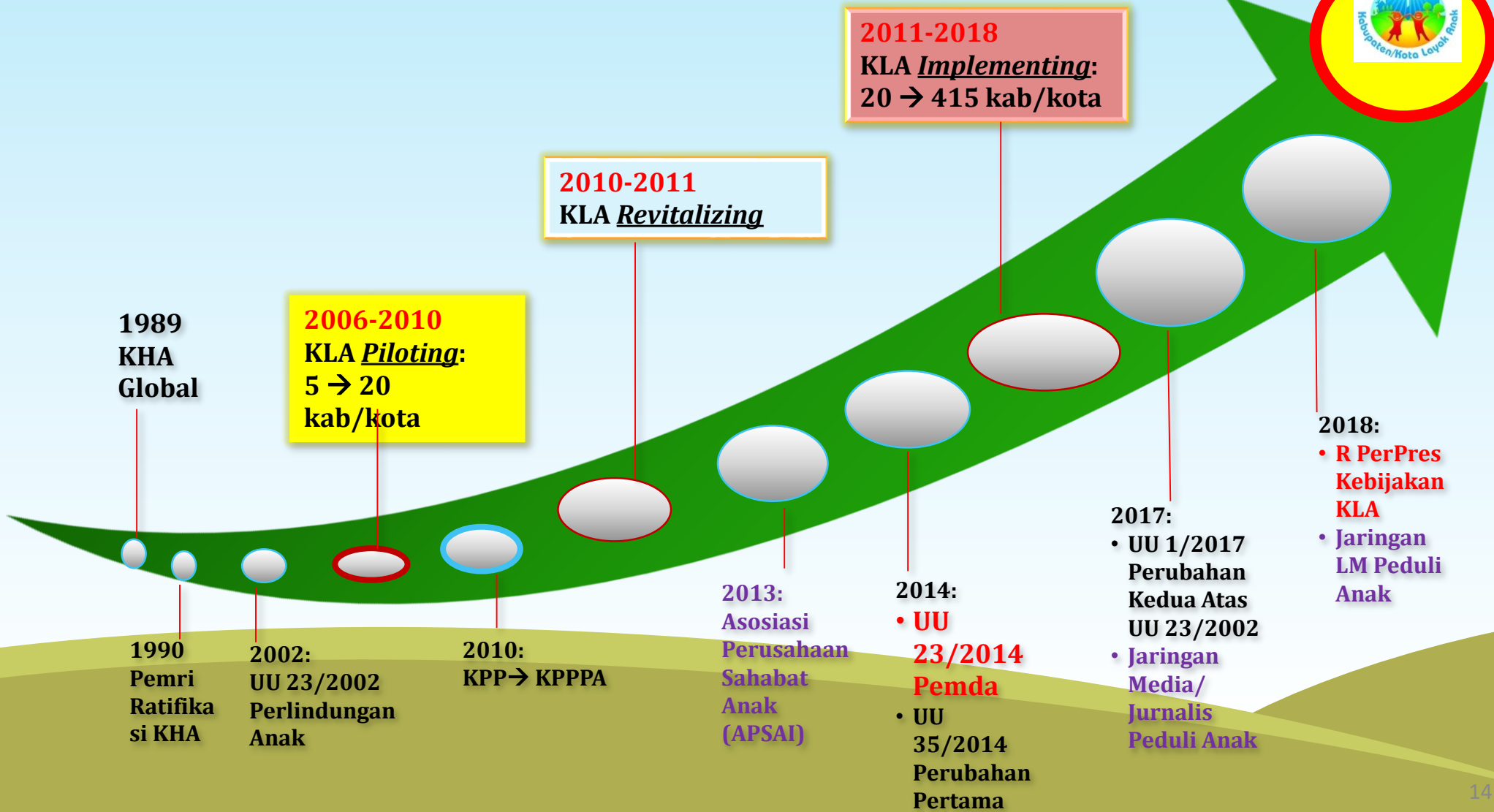
UU 35/2014 tentang Perubahan Atas UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 21

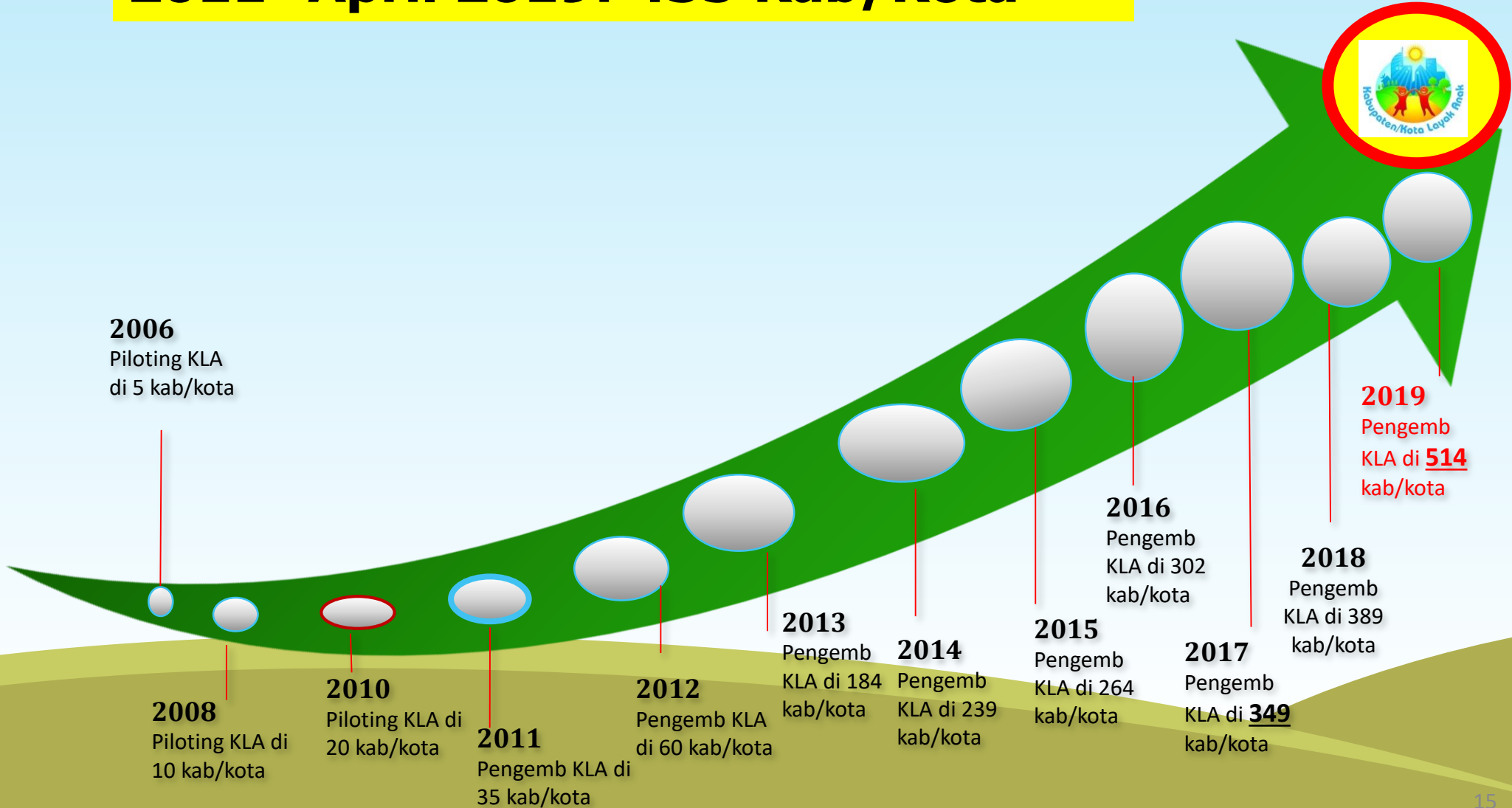
- Ayat (4) Untuk menjamin pemenuhan hak anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), **Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab** untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah.
- Ayat (5) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun **Kabupaten/ Kota Layak Anak.**
- **Ayat (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Presiden.**

PENYELENGGARAAN KLA

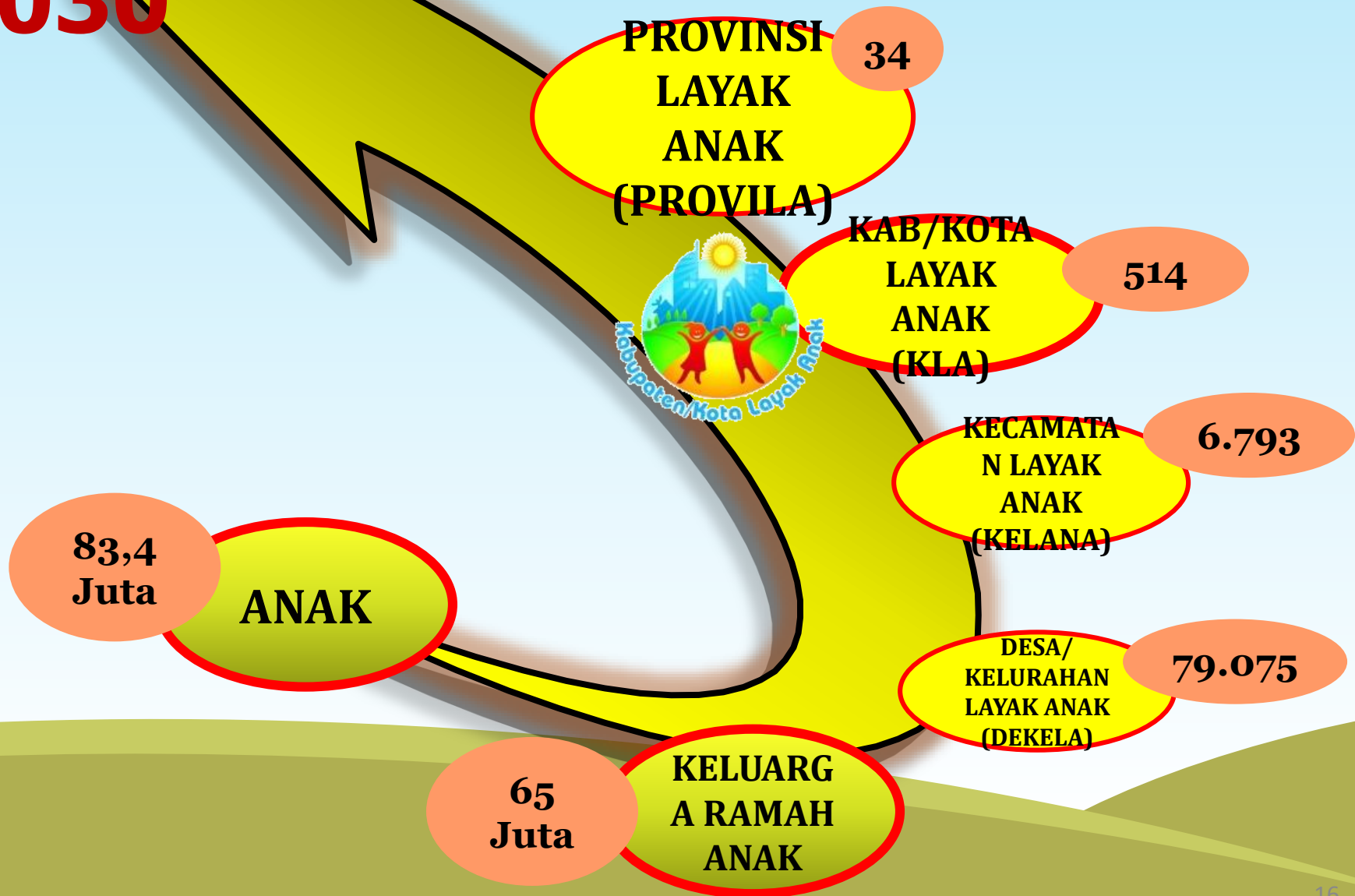
MENTERI	GUBERNUR	BUPATI/WALIKOTA
mengkoordinasikan pelaksanaan Kebijakan KLA.	bertanggung jawab atas terwujudnya KLA di provinsi	penyelenggaraan KLA di kabupaten/kota, bupati/walikota membentuk gugus tugas KLA
melakukan evaluasi penyelenggaraan KLA secara berkala setiap tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan	melakukan evaluasi penyelenggaraan KLA secara berkala setiap tahun sesuai kewenangannya	evaluasi penyelenggaraan KLA secara berkala setiap tahun sesuai kewenangannya.



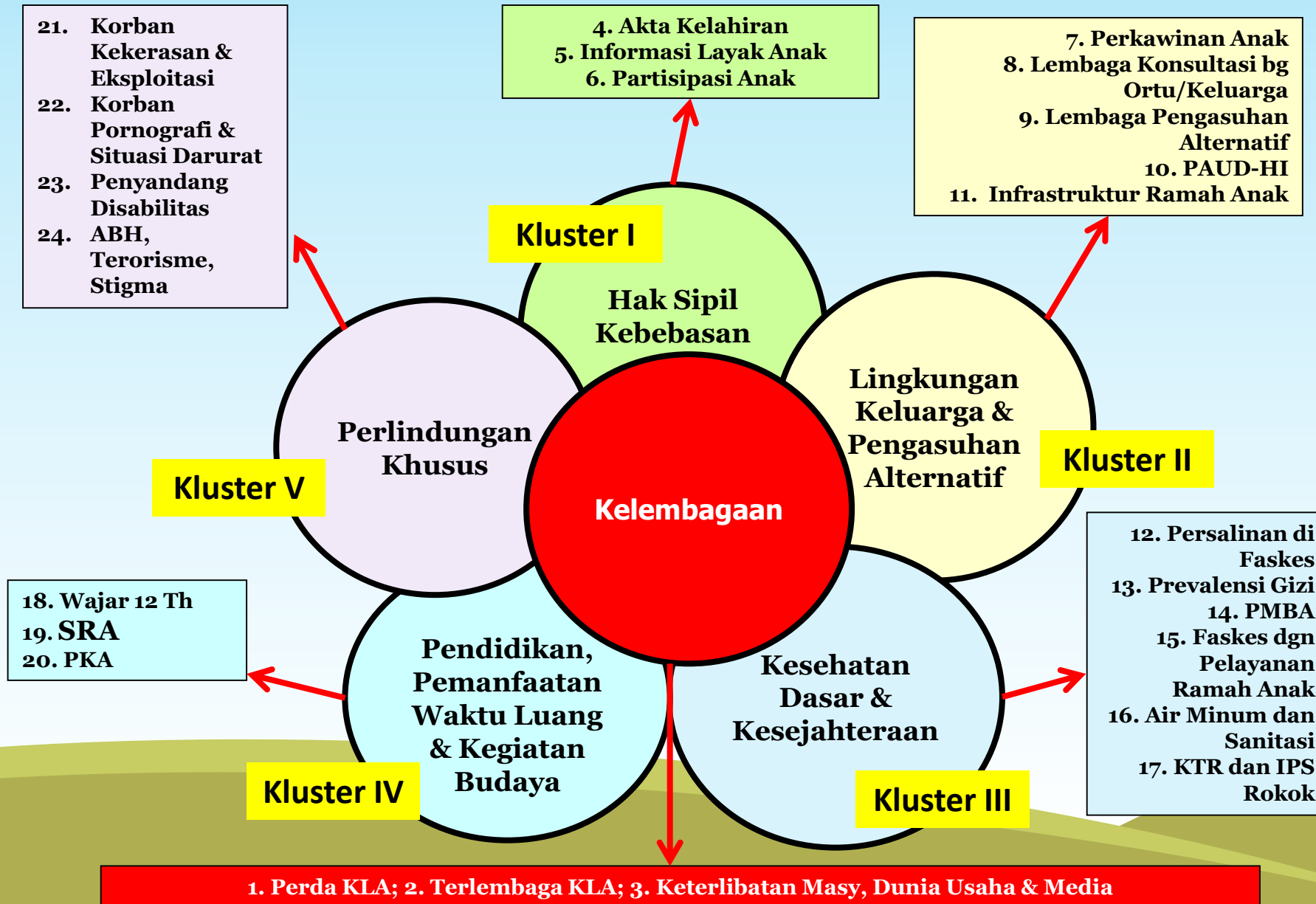
2006-2010: 20 Kab/Kota
2010 Revitalisasi
2011- April 2019: 435 Kab/Kota



IDOLA INDONESIA LAYAK ANAK **2030**



24 Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)



PENDAHULUAN

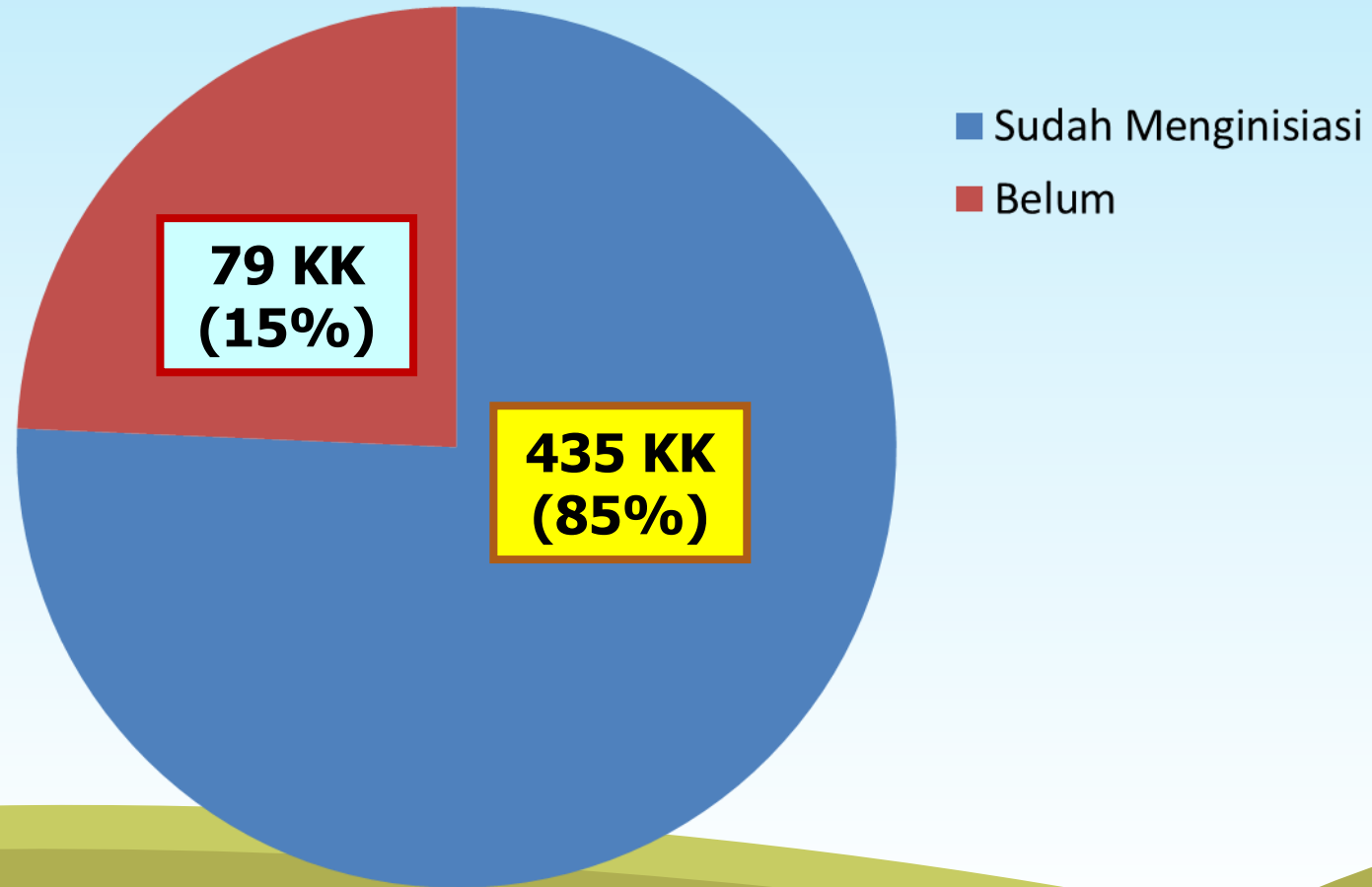
Tahun 2019 merupakan pelaksanaan Evaluasi KLA ke-7



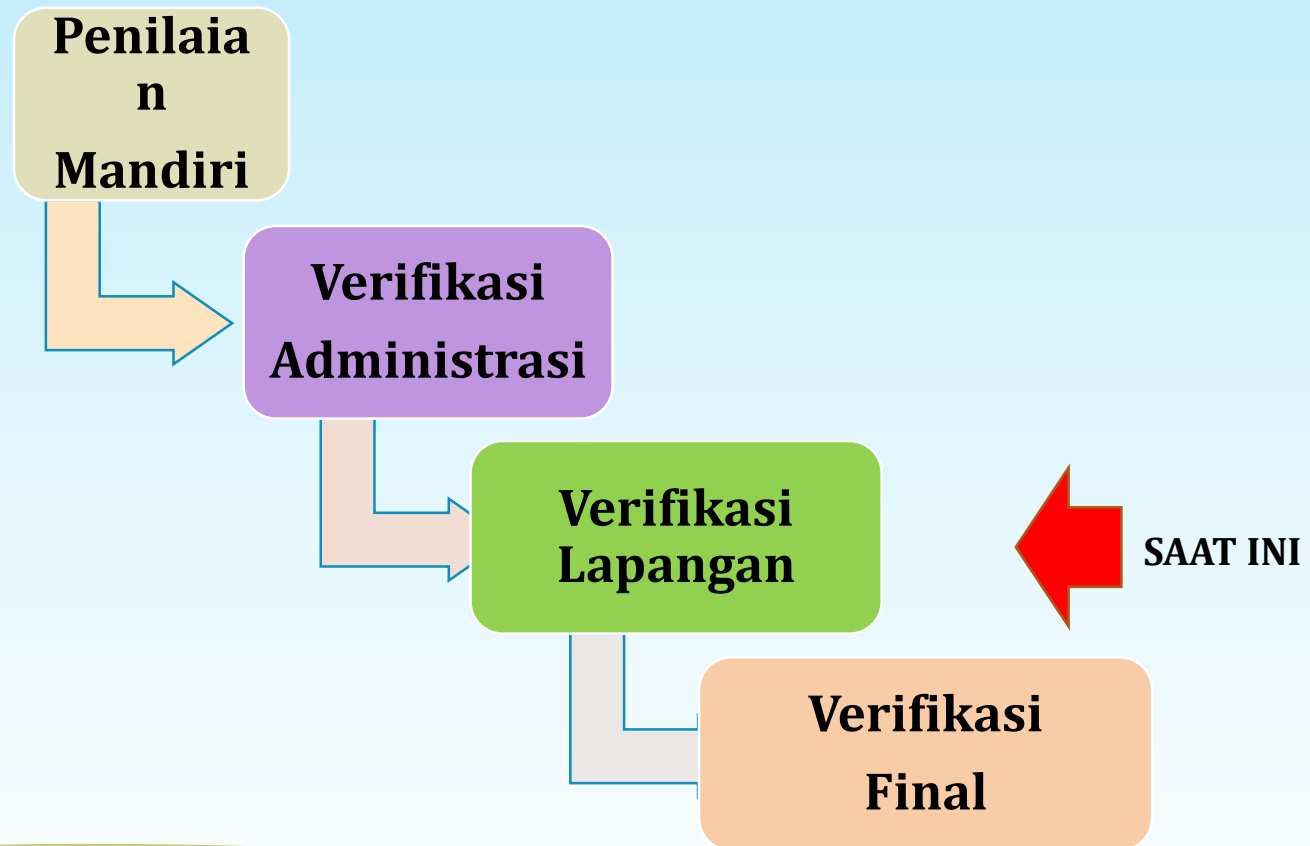
TUJUAN EVALUASI

Untuk **mengetahui capaian** penyelenggaraan KLA dan **memberikan rekomendasi** bagi perbaikan penyelenggaraan KLA.

435 KABUPATEN/KOTA YANG TELAH MENGINISIASI "KLA" HINGGA APRIL 2019

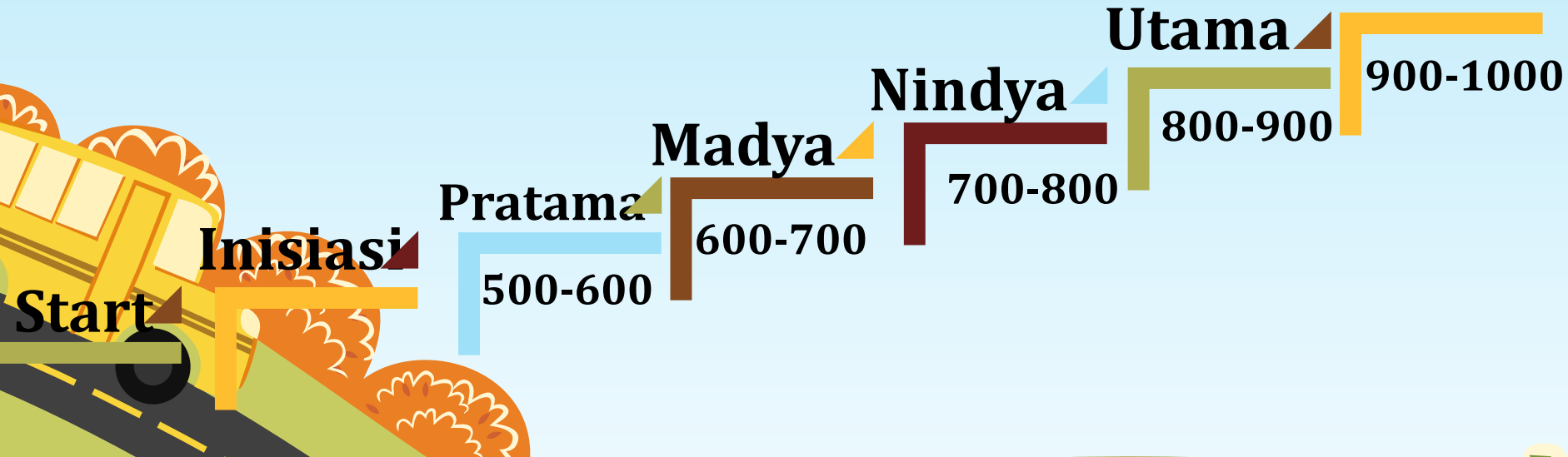


EVALUASI KLA 2019

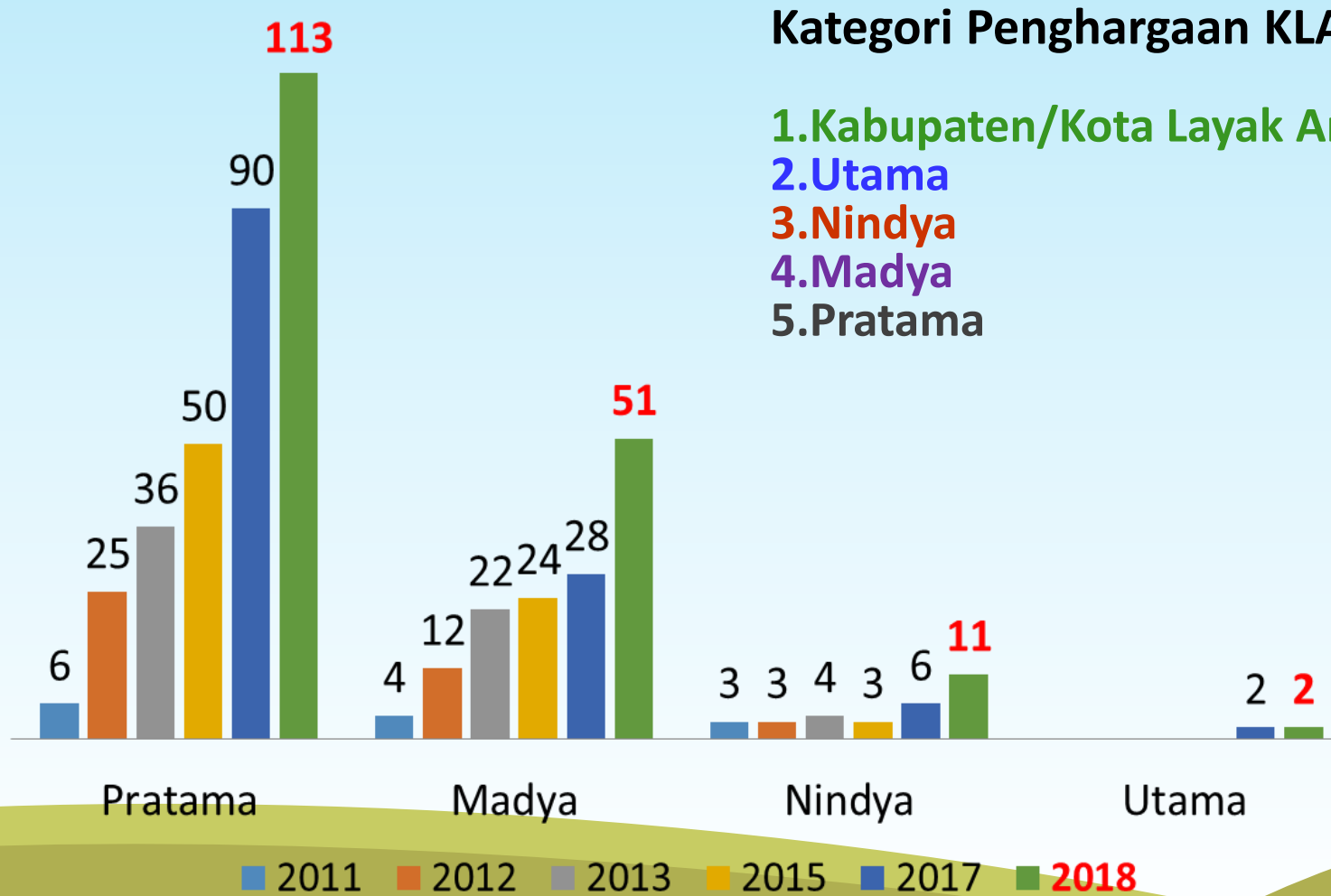




KLA



PENERIMA PENGHARGAAN KLA BERDASARKAN KATEGORI Tahun 2011, 2012, 2013, 2015, 2017, dan 2018





HASIL EVALUASI KLA 2019 (SEMENTARA)

Total KK : 514
VA>500 = Lolos KE VL : 244

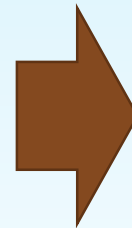
✓ Naik Extra	: 13 KK
✓ Naik	: 141 KK
✓ Tetap	: 79 KK
✓ Turun	: 5 KK



PERBANDINGAN EVALUASI KLA

Evaluasi KLA 2018

PM → 389 KK
VA → 221 KK
VL → 182 KK
VF → 177 KK



Evaluasi KLA 2019

PM → 432 KK
VA → 300 KK
VL → 244 KK
VF → ... KK

NILAI

PER KLAS TER + KELEMBAGAAN KLA TAHUN 2019

Evaluasi KLA 2018

KELEMBAGAAN	150
KLASTER 1	135
KLASTER 2	205
KLASTER 3	185
KLASTER 4	110
KLASTER 5	215
TOTAL	1000

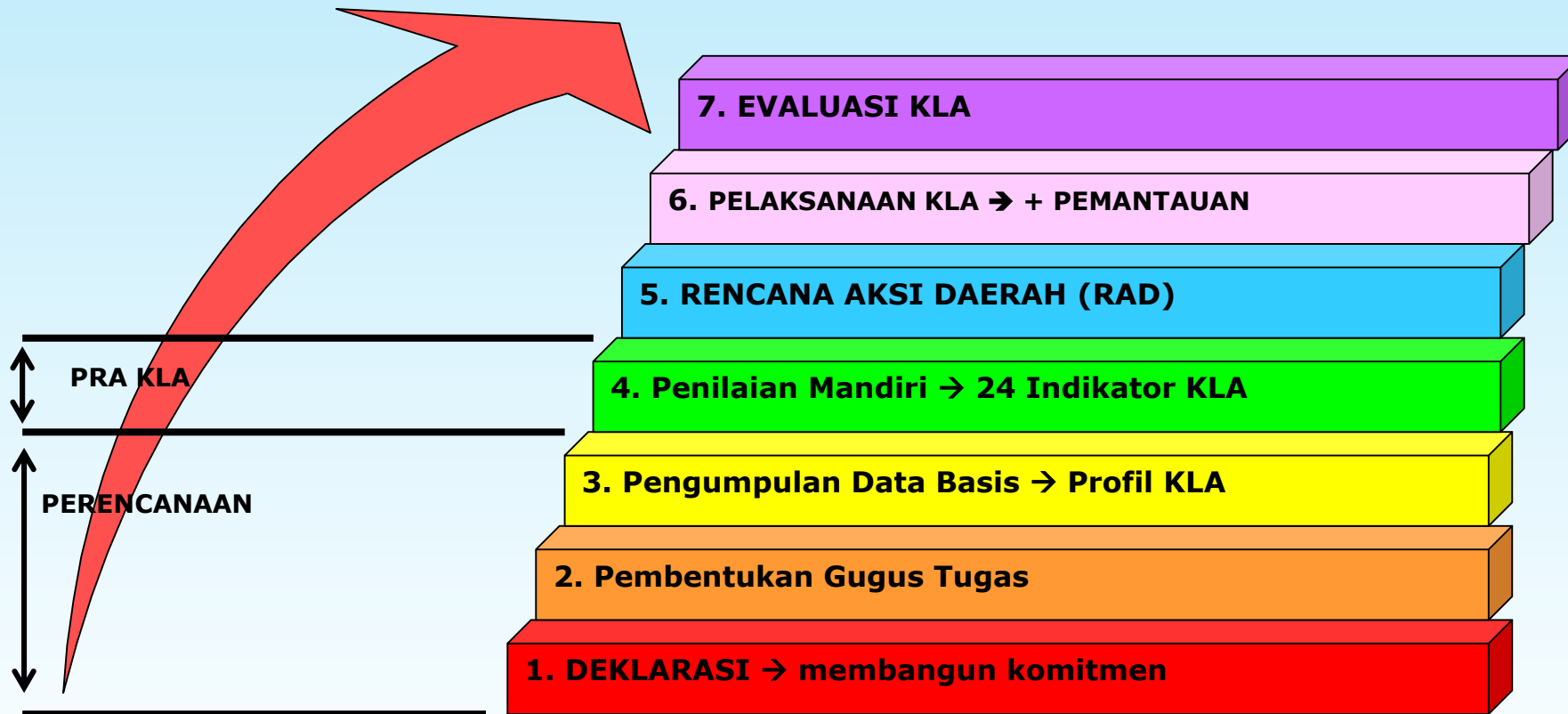
Evaluasi KLA 2019

KELEMBAGAAN	100
KLASTER 1	125
KLASTER 2	180
KLASTER 3	150
KLASTER 4	130
KLASTER 5	215
KECAMATAN	25
DESA/KEL	75
TOTAL	1000

STRUKTUR URUSAN PEMERINTAHAN (UU No. 23 Tahun 2014)



TAHAPAN Penyelenggaraan KLA



Tahap Penyelenggaraan

N O	7 LANGKAH	DEF OPERASIONAL	KEKUATAN	KELEMAHA N	ACTION
1	Komitmen				
2	Gugus Tugas KLA				
3	Profile Anak Profile KLA				
4	Penilaian mandiri				
5	RAD KLA				
6	Implementasi KLA				
7	Evaluasi				

**9 KOMPONEN KUNCI
DI SETIAP INDIKATOR**

1. ADANYA PERATURAN/KEBIJAKAN DAERAH TENTANG

KLA

**2. PERSENTASE ANGGARAN YANG DIALOKASIKAN
UNTUK KLA**

3. SDM TERLATIH KONVENSASI HAK ANAK

4. KETERLIBATAN FORUM ANAK/KELOMPOK ANAK

**5. KEMITRAAN ANTAR OPD DALAM PENGEMBANGAN
KLA**

6. KETERLIBATAN LEMBAGA MASYARAKAT DALAM KLA

7. KEMITRAAN DENGAN DUNIA USAHA DALAM KLA

8. KEMITRAAN DENGAN MEDIA DALAM KLA

9. INOVASI DALAM KLA

24 Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)

